

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press, 2024.
- Kadir, Abdul. *Asas dan Dasar Pemungutan Pajak*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016).
- Khalimi dan Prawira, Dharma. *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustaqiem. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Mustofa. *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT Edisi Revisi*, Yogyakarta: KaryaMedia, 2014.
- Oktian Fajar Nugroho. *Pengumpulan dan Pengolahan Data*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Siahaan, Marihot P. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktik Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke-3)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.
- Soemitro, Rochmat dan Sugiharti, Dewi Kania. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. Bandung: Eresco, 1979.
- Sri Mamudji, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13).
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

Artikel Suatu Jurnal

- Agun Saputra dan Christine S. T. Kansil, “Keabsahan dan Kekuatan Hukum Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Sebagai Akta Di Bawah Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Unes Law Review* 6, No 2 (Desember, 2023): 5750-5762, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Arivan Amir, “Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, No 1, (Mei 2019): 51-65, <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.311>
- Bangkit Cahyono, “Asas Pemungutan Pajak dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa”, *Journal of Tax and Bussines* 2, No 2 (September 2021): 75-83, <https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36>
- Dian Apriandini dan Amad Sudiro, “Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas yang Belum Mendapatkan Pemecahan Sertipikat dari Developer yang Dipailitkan”, *Binamulia Hukum* 12, No 1 (Juli 2023): 57-66, [10.37893/jbh.v12i1.435](https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.435).
- Dian Lastiani, “Implementasi UU No 1 Tahun 2022 Pasal 44 tentang Pemungutan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 4, No 1 (Mei, 2023): 75-106, <https://doi.org/10.29303/jap.v4i2.62>.

- Henry Suhardja, “Peran Pemerintah Terhadap Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat sebagai Subjek Pajak Penghasilan”, *Jurnal Lex Specialis* 4, No 1 (Agustus 2023): 115-123, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>.
- Made Ara Denara dan I Made Dedy Priyanto, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No 1 (Desember 2019): 1-18, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/55865/33022>
- Nafiah Faadiyah, *et al*, “Validitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli: Dasar Terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, No 1 (Mei 2024): 14-22, [10.28946/rpt.v13i1.3577](https://doi.org/10.28946/rpt.v13i1.3577).
- Ni Luh Yunik Sri Antari, “Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, No 2 (Oktober 2018): 380-290, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i02.p05>
- Nuridin dan Muhammad Wildan, “Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli”, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No 2, (November 2020): 192-201, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.91>.
- Putri Aurelia Vani, Ferdi, dan Hengki Andora, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019)”, *Unes Law Review* 6, No 4 (Juni, 2024): 12511-12525, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Ronal Raviyanto dan Amin Purnawan, “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Pendekatan *Self Assessment System*”, *Jurnal Akta* 4, No 4 (Desember 2017): 567-574, <https://core.ac.uk/download/pdf/270293219.pdf>.
- Rusnan, *et.al*, “Implikasi Penerapan Asas *Self Assesment System* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak”, *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No 1 (Juni 2020): 15-30, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>.
- Sumitro Salim, “Penerapan Sifat Terang dan Tunai dalam Jual Beli Tanah yang Belum Lunas (Sudi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/PDT.G/2020)”, *Indonesian Notary* 3, No. 4 (Desember, 2021): 669-680, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/30>.

Internet

- Aesia, “Apa Itu Surat Tanah AJB? Berikut Ini Penjelasan Lengkap!”, <https://bit.ly/3GaZ4GI> (diakses Maret 07, 2025).
- Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, “Cara Menghitung BPHTB dan PPh”, <https://fh.ubhara.ac.id/2023/09/05/cara-menghitung-bphtb-dan-pph/>. (diakses 24 November 2024).
- Isabela, Monica Ayu Caesar, “Asas-Asas Pemungutan Pajak”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/02100011/asas-asas-pemungutan-pajak>. (diakses 24 November 2024).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, “Peralihan Hak Jual Beli”, <https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan> (diakses Januari 01, 2025).

Sari, Halimah Kurnia, “Mau Beli Tanah, Apa Saja Pajaknya”, <https://pajak.go.id/id/artikel/mau-beli-tanah-apa-saja-pajaknya> (diakses Januari 02, 2025).

Wahyuni, Wila. “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=2>. (diakses 12 November 2024).

Lain-Lain

Wawancara dengan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris/PPAT yang berkedudukan di Kota Denpasar, di Kantor Notaris/PPAT yang bersangkutan pada tanggal 14 Maret 2025.

Wawancara dengan I Nyoman Sumardika, S.H., M.Kn, Notaris/PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Tabanan, di Kantor Notaris/PPAT yang bersangkutan pada tanggal 11 April 2025.

Wawancara dengan I Putu Adnyana Putra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bakeuda Kabupaten Tabanan, di Kantor Bakeuda Kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Februari Tahun 2025.

Wawancara dengan Ida Monica Elisabeth Sidjabat, S.H., Notaris/PPAT yang berkedudukan di Kota Denpasar, di Kantor Notaris/PPAT yang bersangkutan pada tanggal 11 Maret 2025.

Wawancara dengan Nyoman Sutrisna Janureksa, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pajak Daerah Kota Denpasar, di Gedung Graha Sewaka Dharma, pada tanggal 26 Februari Tahun 2025.

Yudha Cahya Kumala, Diskusi Hukum “BPHTB dalam Pembuatan PPJB terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 117/PUU/XII/2023”, di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang, pada tanggal 07 Oktober 2024.